

ANALISIS KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Anni Mariana pohan^{1*)}, Tri Eva Juniasih², Wawan Patriansyah³

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indoensia

^{2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : -

Abstract

Tourism is a strategic sector in driving regional economic growth and community empowerment. This study aims to analyze the performance of the Culture and Tourism Office of North Padang Lawas Regency in developing regional tourism potential, identifying factors influencing performance, the constraints encountered, and efforts to improve performance. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Research informants consist of the Head of the Office, the Head of the Tourism Division, and program implementation staff. Data analysis was conducted thematically based on public sector organizational performance indicators: effectiveness, efficiency, service quality, responsiveness, and accountability. The results indicate that the performance of the Culture and Tourism Office has been carried out in accordance with its duties and functions, though it is not yet optimal. Factors affecting performance include limitations in human resources, budget, program planning, inter-agency coordination, and supporting infrastructure. The primary constraints faced are budget limitations, lack of tourism destination facilities, low community participation, and accessibility to tourist locations. Efforts to enhance performance are being made through human resource training, budget optimization, strengthening coordination, tourism promotion, and community involvement. This study recommends the need for continuous support from the local government and the community to achieve more optimal and sustainable tourism development.

Key Word: Organizational Performance, Culture and Tourism Office, Tourism Development

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengembangan potensi pariwisata daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang Pariwisata, dan staf pelaksana program. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan indikator kinerja organisasi sektor publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan sesuai tugas dan fungsi, namun belum optimal. Faktor yang memengaruhi kinerja meliputi keterbatasan sumber daya manusia,

anggaran, perencanaan program, koordinasi antarinstansi, serta sarana dan prasarana pendukung. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, fasilitas destinasi wisata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta aksesibilitas lokasi wisata. Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi, promosi pariwisata, dan pelibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kinerja Organisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata

I. LATAR BELAKANG

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya lokal. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing. Keberhasilan pengembangan pariwisata daerah sangat ditentukan oleh kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tersebut, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kinerja organisasi sektor publik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam konteks pariwisata, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target administratif, tetapi juga dengan keberhasilan pengembangan destinasi wisata, kualitas pelayanan publik, promosi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya. Kinerja yang optimal diharapkan mampu mengubah potensi pariwisata menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam, meliputi wisata alam, budaya, dan sejarah. Potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata, rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, serta belum maksimalnya kegiatan promosi dan pengelolaan pariwisata.

Belum optimalnya pengembangan pariwisata tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi lintas sektor, aksesibilitas lokasi wisata, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi kinerja dinas dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pariwisata yang dimiliki dengan hasil pengelolaan yang dicapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja

dinas dalam pengembangan potensi pariwisata, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta kendala dan upaya yang telah dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pengembangan pariwisata daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya lokal. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan pariwisata daerah sangat ditentukan oleh kinerja organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kinerja organisasi sektor publik mencerminkan kemampuan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan pariwisata, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan perencanaan program, pelaksanaan pengembangan destinasi, promosi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Kinerja yang optimal diharapkan mampu mengubah potensi pariwisata menjadi sumber

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah yang cukup beragam. Potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan daerah. Namun, dalam praktiknya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, serta belum maksimalnya promosi dan pengelolaan destinasi wisata.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi faktor penghambat kinerja dinas pariwisata di daerah. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menganalisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menggunakan indikator kinerja organisasi sektor publik masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengembangan potensi pariwisata daerah. Penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, kendala yang

dihadapi, dan upaya peningkatan kinerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian administrasi publik serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

1.1 Kinerja Organisasi Sektor Publik

Kinerja organisasi sektor publik merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Dalam perspektif administrasi publik, kinerja tidak hanya dilihat dari output administratif, tetapi juga dari outcome dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dwiyanto menekankan bahwa kinerja organisasi publik harus mampu memenuhi kebutuhan publik secara responsif dan akuntabel, sementara Mahsun menyatakan bahwa kinerja sektor publik berkaitan erat dengan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja organisasi publik menjadi bagian dari penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui analisis kinerja, organisasi publik dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan program serta merumuskan strategi perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan organisasi

perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Kinerja dinas ini tercermin dari kemampuan dalam merumuskan program pengembangan destinasi wisata, melakukan promosi pariwisata, menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memberdayakan masyarakat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja dinas pariwisata di daerah sering menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja dinas pariwisata memerlukan dukungan kebijakan, perencanaan yang terintegrasi, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1.3 Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata daerah merupakan proses terencana dan berkelanjutan dalam mengelola potensi wisata agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep pengembangan pariwisata menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sebagai prinsip pariwisata berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengembangan pariwisata memerlukan peran aktif pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, promosi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Keberhasilan pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

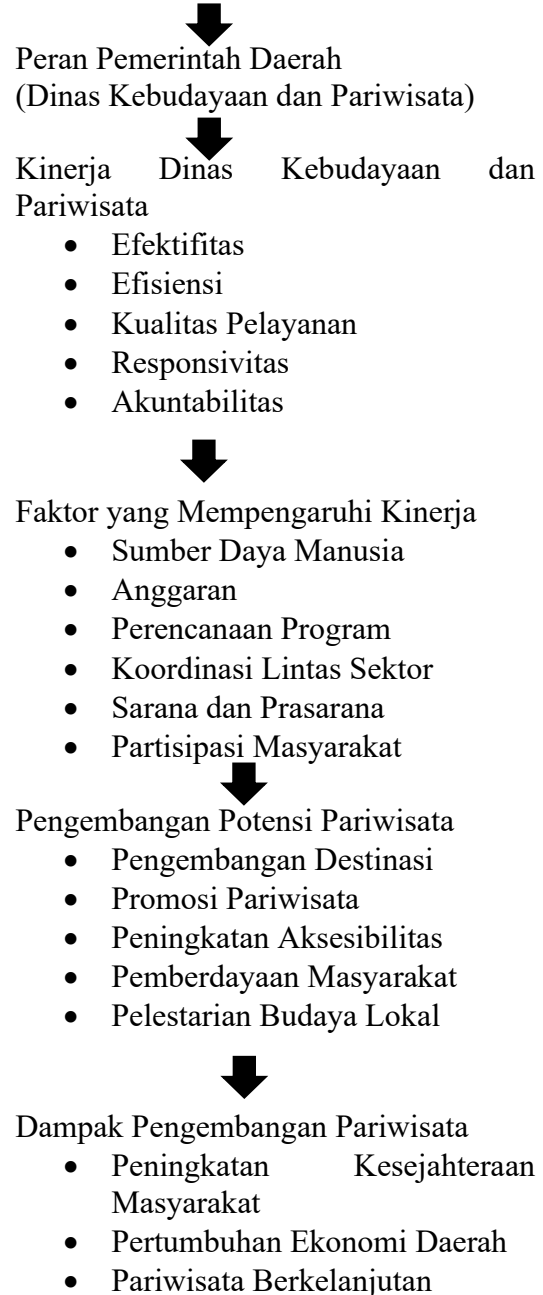
1.4 Hubungan Kinerja Organisasi dan Pengembangan Pariwisata

Kinerja organisasi perangkat daerah memiliki keterkaitan langsung dengan keberhasilan pengembangan pariwisata daerah. Kinerja yang efektif dan efisien akan mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan daya saing destinasi wisata. Sebaliknya, kinerja organisasi yang belum optimal dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pengembangan pariwisata.

Dalam penelitian ini, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianalisis menggunakan indikator kinerja organisasi sektor publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja dinas berkontribusi terhadap pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Potensi Pariwisata Daerah
(Kabupaten Padang Lawas Utara)



3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengembangan potensi pariwisata daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pengungkapan makna, proses, dan

konteks pelaksanaan kebijakan serta program pengembangan pariwisata berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan waktu penelitian selama $\pm$ tiga bulan, yaitu pada Mei–Juli 2025. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

3.1 Informan

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pejabat struktural yang membidangi pengembangan pariwisata, serta staf pelaksana program.

Informan pendukung berasal dari pihak terkait, seperti tokoh masyarakat atau pengelola destinasi wisata, untuk memperkaya perspektif penelitian. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terkait pelaksanaan tugas, program, serta kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai kinerja organisasi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan program dan kondisi destinasi wisata. Dokumentasi digunakan untuk menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dinas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan indikator kinerja organisasi sektor publik, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dengan memverifikasi data dari berbagai sumber.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen resmi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

4. HASIL PENELITIAN

Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Utara dalam pengembangan potensi pariwisata telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, namun belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program pengembangan pariwisata telah mengacu pada dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas, namun capaian yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi pariwisata daerah.

Ditinjau dari aspek efektivitas, program pengembangan pariwisata telah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa kegiatan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran dan belum terintegrasinya program pengembangan pariwisata dengan sektor pendukung lainnya.

Dari aspek efisiensi, pemanfaatan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya manusia, belum optimal. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas program lebih difokuskan pada kegiatan rutin dibandingkan pada pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan. Selain itu, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata masih terbatas, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal.

Aspek kualitas pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat dan pelaku pariwisata sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Informasi pariwisata, pendampingan kepada pengelola destinasi, serta pelayanan promosi belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan.

Pada aspek responsivitas, dinas telah menunjukkan upaya dalam merespons kebutuhan dan permasalahan pengembangan pariwisata, seperti melalui pelaksanaan kegiatan promosi dan pembinaan kelompok sadar wisata. Namun, respons tersebut belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengelola destinasi wisata di daerah.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Namun, akuntabilitas kinerja tersebut masih lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan capaian hasil dan dampak pengembangan pariwisata secara nyata.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata daerah. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, keterbatasan anggaran, serta perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah. Faktor eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Kendala dan Upaya Peningkatan Kinerja

Kendala utama yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pendukung destinasi wisata, rendahnya aksesibilitas menuju lokasi wisata, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, dinas telah melakukan beberapa upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan promosi pariwisata, serta pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, & Wispandono, A. (2023). *Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi dan manajemen publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Frederickson, H. G. (2010). *The public administration theory primer* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Gunn, C. A., & Var, T. (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases* (4th ed.). New York: Routledge.
- Habibi, A., & Aprilian, R. (2020). *Metodologi penelitian sosial: Analisis data kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Krisnawati, D. (2021). *Analisis fenomena sosial: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lahengko, D. (2020). *Pengelolaan pariwisata daerah: Tantangan dan strategi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja organisasi publik: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja organisasi publik: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2018). *Manajemen kinerja sumber daya manusia: Konsep, teori, dan aplikasinya dalam organisasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, A. A. A. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Pendit, N. (2006). *Pariwisata Indonesia: Konsep dan strategi pengembangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prabawati, H., Handoko, A., & Hariyoko, I. (2022). *Pengembangan wisata heritage berbasis budaya lokal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratama, A., & Lestari, D. (2021). *Kinerja organisasi sektor publik dalam pembangunan*

pariwisata berbasis daerah.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara,
9(1), 67–78.

Putra, D. (2019). *Community-based tourism: Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.